

REPRESENTASI SEKOLAH KEHIDUPAN PADA KAMPUNG MULTIKULTURAL DI JAWA TIMUR

Ekna Satriyati, SS, M.Hum.*

ABSTRAK

Akar multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia sehingga mempelajari kehidupan dalam suatu ruang komunitas yang memiliki multikultur budaya dalam satu ruang komunitas bernama kampung menjadi menarik untuk diwacanakan. Pelajaran multikulturalisme dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan, serta berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan menjadi representasi keberagaman karakter serta budaya dalam kemanunggalan rasa yakni toleransi. Pemahaman kampung multikultural selama ini hanya sebagai tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dengan keberagaman suku, etnis, agama, bangsa, karakter perilaku, serta adat istiadat, namun lebih jauh fungsi kampung multikulturalisme ini juga merupakan wahana belajar mengenai kehidupan manusia yang syarat dengan potensi konflik dan perubahan sosial. Titik kajian ada pada pola toleransi pada tiga kampung multikultural di Jawa Timur dengan representasi Kampung Duko di Pulau Kangayan pada Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kata Kunci : Kampung multikultural, sekolah kehidupan dan pola toleransi.

PENDAHULUAN

Pembentukan negara Indonesia menjadi negara merdeka beserta seluruh proses pembangunannya merupakan rangkaian yang telah dilakukan Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan utamanya yakni mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian kesejahteraan rakyat berarti meratanya pembangunan bagi seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Tuntutan pembangunan berbasis kesukuan disebabkan kondisi Bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh *stereo-type* dan prasangka yang menghasilkan perjenjangan sosial secara primordial sangat subjektif (Suparlan, 2002).

Hasil pembangunan masyarakat majemuk di Indonesia saat ini menunjukkan kuatnya basis kesukuan dan stratifikasi sosial akibat masuknya konsepsi pluralisme masyarakat dimana tatanan egaliter dan demokratis gagal tercipta. Kekuatan masyarakat ditunjukkan dengan sikap otoriter terhadap corak kesukuan yang beranakeragam dengan menekankan pada feodalistis, paternalistis sampai etnosentris (Salim, 2002). Budaya antar etnis tidak dapat dipahami sepotong demi sepotong tetapi harus menjadi rajutan lengkap yang menjadi pemahaman dalam anyaman yang kokoh dan kuat. Suparlan menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan suku bangsa (etnis) dalam masyarakat. Perbedaan tersebut harus dipahami dalam wadah yang transparan agar diketahui oleh masyarakat umum sehingga dalam ruang publik yang diketahui oleh orang banyak, tidak kelihatan adanya budaya yang dominan (Salim, 2002).

* Mahasiswa PPS Antropologi UGM. Tulisan merupakan bagian dari rencana proposal disertasi berkaitan dengan kampung multikultural..Kritik dan saran dapat disampaikan ke kontak : ekna_satriyati@yahoo.com

Membangun kesadaran multikultural di kalangan masyarakat heterogen dapat dilakukan pada dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Gagasan menulis dan mengeksplorasi bentuk kampung multikultural di Indonesia dilandasi oleh pemahaman bahwa keluarga merupakan tempat pertama belajar budaya yang dapat mengajarkan anak-anak sebagai potensi pengembang basis pergaulan utama interaksi multikultural. Interaksi di antara keluarga yang berbeda kultur dalam lingkungan masyarakat tertentu yang mendiami suatu wilayah utamanya wilayah tinggal memungkinkan warga memiliki pergaulan yang cukup intens dengan beragam pola budaya di wilayah yang disebut Kampung. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000), pengertian kampung adalah desa, dusun atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota dan biasanya rumah-rumahnya kurang bagus. Kamus Tata Ruang (1998) mendefinisikan kampung sebagai kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari kecamatan, sedangkan kampung etnis adalah kawasan permukiman kota yang lama dengan kekhasan tradisi, biasanya terdiri atas kelompok tertentu yang didasarkan pada persamaan adat, agama, atau kebudayaan.

Kampung multikultural merupakan jenis wilayah tinggal yang terdiri atas beragam suku yang memiliki pola kebiasaan berbeda namun tetap mempertahankan pranata masing-masing dan saling menghormati. Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Indonesia telah memiliki ribuan kampung multikultur yang tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai ke Papua, dari awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Namun pada masa pemerintahan orde baru, kampung multikultur tersamar dengan ideologi monokultur dan berorientasi sentrasiltik Jawa. Beberapa tradisi dan ritual agama tersimpan rapat pada masa tersebut karena dianggap mengganggu kesatuan negara jika ditampilkan, contoh : tradisi barongsai, peringatan tahun baru Cina, belum diakuinya agama Khongucu, dan lain-lain.

Potensi konflik dan keinginan untuk menunjukkan keanekaragaman semakin memuncak sehingga tercetuslah gerakan reformasi yang kemudian berhasil mengganti masa orde baru dengan masa reformasi dan pasca reformasi. Kebebasan multikultur terbuka seluas-luasnya dengan mulai diakuinya agama Khongucu dan diperbolehkannya tradisi serta ritual dari bangsa lain yang menetap di Indonesia. Demikian halnya kampung multikultural, sekelompok masyarakat yang selama ini hanya menyimpan tradisinya dari lingkungan sekitar saat ini dapat menampilkan bahkan mengajarkan tradisi tersebut pada kelompok masyarakat lain secara luas tanpa rasa takut pada pemerintah. Perkembangan pemahaman masyarakat di Indonesia dalam memahami multikultur dari masa orde baru sampai pasca reformasi pada awalnya hanya pada permukaan bahkan ada yang beranggapan bahwa multikultur hanyalah membentuk eksklusivitas dan menjadi pembatas identitas etnik sehingga pasca reformasi terjadilah pertikaian antar etnis. Contoh : Dayak dengan Madura di Sampit pada tahun 2001,

sebelumnya terjadi di Sambas, Umat Muslim dan Nasrani di Ambon dan sebagian Maluku 1999-2004 dan lain-lain.

Kampung Multikultural dalam bahasan tulisan ini adalah Kampung-kampung yang terletak di Pulau Kambangan Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur Indonesia. Wacana kampung-kampung di Pulau Kambangan ini menjadi menarik pada saat diketahui bahwa dalam rentang puluhan tahun, pulau yang dihuni beragam suku meski memiliki mayoritas suku yakni Madura, tidak pernah mengalami konflik. Padahal sejarah reformasi mencatat bahwa suku Madura seringkali berkonflik dan bertikai dengan suku lain apabila Suku Madura bermigrasi ke wilayah lain di Indonesia. Pertikaian selalu dipicu kecemburuan ekonomi. Proses menerima dan berasimilasi dengan suku lain secara menyeluruh diberbagai aspek kehidupan masyarakat yang berada di kampung-kampung Pulau Kambangan, menunjukkan bahwa Suku Madura di Pulau Kambangan mampu membangun pondasi multikultur. Ada faktor-faktor yang mampu dipertahankan Suku Madura di Pulau Kambangan sehingga integrasi sosial terbangun disana. Faktor pemertahanan yang menjadi landasan integrasi sosial Masyarakat Kambangan menjadi kajian lebih lanjut guna menganalisis terjadi perubahan ide dan aplikasi multikultur pada saat masyarakat mengalami perubahan sosial.

KEMAMPUAN BERTAHAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASA KINI

Sebelum membahas lebih lanjut tentang keberterahan masyarakat Kampung-kampung multikultur, maka perlu diketahui tentang deskripsi Pulau Kambangan sebagai wilayah teritorial secara luas. Pulau Kambangan atau disebut juga Kangean merupakan gugusan pulau yang terletak di sebelah ujung timur Pulau Madura, Laut Jawa. Kepulauan ini terdiri dari sedikitnya 60 pulau, dengan luas wilayah 487 km². Pulau-pulau terbesar adalah Pulau Kangean (188 km²), Pulau Paliat, dan Pulau Sapanjang. Pulau Kangean bagian timur terdapat pegunungan dan puncak tertingginya 364 m. Kecamatan Arjasa membawahi Pulau Kangean bagian barat, Kecamatan Kambangan membawahi Pulau Kangean bagian timur, sedangkan Kecamatan Sapeken membawahi pulau-pulau kecil dan mendominasi bagian timur kepulauan Kangean (antara lain Sapeken, Paliat, Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Pagerungan Besar, dan Pagerungan Kecil). (Laporan LPPM, 2009).

Kondisi sosial budaya masyarakat yang mendiami Pulau Kambangan ini sangat unik. Pada umumnya masyarakat yang mendiami Pulau Kambangan mayoritas adalah Suku Madura. Namun dalam perkembangannya saat ini terdapat perbedaan terutama dalam penggunaan bahasa antara Suku Madura di Pulau Kambangan dengan Suku Madura di Pulau Madura daratan (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Hal tersebut dikarenakan bercampurnya Bahasa Madura dengan bahasa-bahasa suku selain Suku Madura yang berada di Pulau Kambangan seperti Suku Mandar, Suku Bajo dan Suku Bugis.

Percampuran bahasa dan penghargaan terhadap penerimaan suku-suku selain madura di Pulau Kangayan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pandangan atau perlakuan diskriminatif dari Suku Madura terhadap suku-suku lain bahkan terjadi proses asimilasi.

Proses asimilasi juga dilakukan oleh pendatang yang keturunan Cina. Rata-rata mereka memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, proses pembauran dengan penduduk pribumi terjadi sangat cepat bahkan sampai pada proses perkawinan baik putra maupun putri tidak menjadi masalah. Demikian halnya dengan keturunan Arab yang berada di Pulau Kangayan juga telah melakukan proses pembauran dengan perkawinan (Djojoprajitno, 2005).

Apabila sepintas diperhatikan Masyarakat Pulau Kangayan, tidak lebih dari kelompok masyarakat yang kekuatannya tidak masuk hitungan bagi para pengambil keputusan pemerintahan baik di Jawa Timur maupun Indonesia. Bahkan, masyarakat Pulau Kangayan cenderung diabaikan karena berdasarkan kerangka analisis produksi pada pangsa produksi yang telah dilakukan kelompok peneliti Perancis antara tahun 2003-2006 menyatakan tidak ada kontrol kelayakan mutu sarana angkutan transportasi di Pulau Kangean sehingga harga-harga barang menjadi tinggi bagi konsumen. Selain itu juga terjadi pemerolehan keuntungan yang sepihak bagi sejumlah pedagang dan usahawan yang memonopoli sejumlah kepemilikan sarana transportasi darat dan laut (Illouz dalam laporan penelitian Pemkab Sumenep, 2007).

Monopoli usaha transportasi darat dan laut yang terjadi di Pulau Kangayan yang dibayangkan oleh peneliti dari Perancis di atas, dikuatirkan akan menyebabkan konflik perebutan perekonomian. Penelitian terdahulu mengenai sosial budaya Masyarakat Kangayan (Satriyati, 2009) merekomendasikan bahwa masyarakat Pulau Kangayan lebih mengutamakan jalinan ikatan-ikatan sosial antar suku disebabkan karena persamaan agama yakni Islam. Suku Madura selaku mayoritas dan suku lain selaku minoritas, masing-masing tidak melakukan propaganda perekonomian maupun agama. Sebaliknya mereka cenderung mencari persamaan sehingga tidak ada peluang untuk terbukanya konflik antar suku.

Hubungan personal antar suku terbina secara terus-menerus dan memperkuat sendi kebersamaan dalam menanggung beban hidup di antara mereka. Solidaritas yang dibangun melalui tradisi keagamaan, dari waktu ke waktu, telah memperkuat kesatuan komunitas sosial, serta tidak lagi memberi peluang terjadinya konflik bernuansa suku. Sebaliknya telah terjadi kerjasama dalam aktivitas sosial, budaya dan agama. Hidup berdampingan dengan membangun solidaritas sosial berbagai suku di Pulau Kangayan menunjukkan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Hal tersebut berarti paham multikulturalisme telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Pulau Kangayan.

Wacana faktor pemertahanan multikultur tidak lepas dari konteks pendidikan multikultural. Pendidikan Multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (Bank, 1989). Pada konteks di Indonesia, peserta didik dari berbagai lembaga pendidikan diasumsikan terdiri dari beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi (Suryadinata, dkk., 2003: 30, 71, 104, dan 179). Kondisi tersebut dinyatakan sebagai Pendidikan bagi Masyarakat Majemuk. Geertz (1992) menyatakan bahwa konsep masyarakat majemuk merupakan *masyarakat pluralistik*. Masyarakat yang ditandai oleh ikatan-ikatan primordial yang dapat diartikan dengan budaya pencitraan atau “penandaan” yang diberikan (*given*), diantaranya: Ras, Bahasa, Daerah/ wilayah, Geografis, Agama, dan Budaya.

Kajian multikultural yang berbeda telah ditawarkan oleh Blum (May, 2001) dengan pendekatan multikultural untuk membahas fokus tentang etika. Berbagai aspek kehidupan dikaji dengan empat nilai yang berbeda tetapi saling berhubungan guna mewujudkan masyarakat multikultural. Blum (May, 2001) menyatakan pokok bagi pendidikan masyarakat multikultural adalah empat nilai yakni antirasisme, multikulturalisme, komunitas antar-ras dan penghargaan terhadap manusia sebagai individu. Blum secara eksplisit merumuskan multikulturalisme sebagai sebuah pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang, penghormatan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, serta upaya mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggota masyarakat. Dalam antropologi, pernyataan tersebut tidak asing lagi karena memberikan ruang yang luas bagi berbeda dan berbagi pendapat (Ahimsa-Putra, 2002).

Pada aplikasi pendidikan multikultural masyarakat di Pulau Kangayan, menunjukkan bahwa sebagian besar Masyarakat Kangayan (berdasarkan observasi pra-riset yang dilakukan pada Juli 2009) telah melakukan :

- 1) Pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan tidak mempersoalkan perbedaan pada saat memutuskan menikah dengan suku atau etnis (suku bangsa) lain dan tidak mempersoalkan perkawinan eksogami.
- 2) Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Menerima secara sosial dan ekonomi kehadiran suku dan etnis lain untuk mendiami secara bersama-sama Pulau Kangayan sebagai tempat tinggal, usaha dan keluarga. Tidak adanya kampung-

kampung tertentu yang berciri khas suku atau etnis tertentu. Hampir keseluruhan kampung-kampung di Pulau Kangayan dihuni multi suku dan multi etnis.

3) Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Berbagai persoalan kehidupan baik hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi di Pulau Kangayan diselesaikan dengan jalur adat atau hukum Negara Indonesia tanpa memandang suku atau etnis sebagai pelaku maupun korban. Demikian halnya pengakuan hak untuk memilih maupun dipilih sebagai wakil rakyat atau pemimpin diberikan sepenuhnya bagi siapa saja yang merasa mampu menjadi wakil rakyat. Dalam beberapa dekade pada masa pasca kemerdekaan, Pulau Kangayan dipimpin oleh keturunan Arab. Hal berbeda terjadi saat ini, banyak tokoh masyarakat yang merupakan keturunan campuran antara Suku Madura dengan Suku Bugis atau Suku Bajo.

4) Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Di antara suku dan etnis lain yang hidup di Pulau Kangayan masih bisa menyelenggarakan kegiatan / ritual adat yang dianut dari daerah asal, contoh : Suku Bajo dengan leluasa menggunakan bahasa Bajo sebagai bahasa sehari-hari mereka tanpa takut tidak dapat berkomunikasi dengan Suku Madura. Komunikasi terbangun dengan sendirinya, antara Suku Madura dan Suku Bajo dengan saling mengajari bahasa mereka masing-masing. Tidak ada keharusan menggunakan Bahasa Madura sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan.

5) Unsur kebersamaan, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Gotongroyong yang terbangun dalam Masyarakat Pulau Kangayan terlihat jelas pada saat dilakukan upacara bersih desa dan larung laut dilakukan secara bersama-sama tanpa menggunakan adat masing-masing suku dalam ritual besarnya. Namun pada masa tertentu apabila adat kelompok masyarakat dari suku tertentu akan melakukan ritual laut secara pribadi / kelompok tetap diperbolehkan.

Pada perkembangan Masyarakat Pulau Kangayan saat ini (2005-2010) ada hal yang cukup menarik yakni terjadi *Open Stratification* atau sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempermasalahkan status sosial dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Hal ini membuka kesempatan kepada para individu untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya (Soekanto, 2006).

Open Stratification juga menyebabkan masyarakat memiliki budaya baru yakni suka meniru atau latah. Salah satunya adalah pada kelompok anak muda, apabila tidak berkenan melanjutkan sekolah tinggi atau malu menjadi nelayan maka pilihan hidupnya adalah keluar dari Pulau Kangayan dan menjadi pekerja informal di Luar Negeri. Negara tujuan utamanya Arab Saudi dan Malaysia. Dengan harapan bekerja ringan, gaji besar. Dampak signifikan dari banyaknya kelompok anak muda yang keluar dari Pulau Kangayan menyebabkan perubahan sosial yang cukup kuat dengan melemahnya

kegiatan-kegiatan budaya dan tradisi kearifan lokal seperti bersih desa dan ritual larung laut yang tidak dipahami oleh kelompok masyarakat usia muda. Pada akhirnya, terjadi asimilasi kebudayaan antara Suku Madura, Bajo, Bugis, Makassar, Jawa, Etnis Cina dan Etnis Arab dengan menyamakannya melalui kegiatan kerohanian Agama Islam. Asimilasi kebudayaan merupakan identitas perubahan sosial pada Masyarakat Pulau Kangayan. Namun sejauh pra-riset yang telah dilakukan selama sebulan yakni Juli Tahun 2009, Masyarakat Pulau Kangayan masih bertahan menerapkan pendidikan Multikulturalnya.

DISCUSSION

Bagi Masyarakat di Negara Indonesia, multikultural merupakan suatu strategi dan integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam mengatasi setiap isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Multikulturalisme mengajarkan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (tunggal ika) yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat, tetapi pengakuan adanya pluralitas (Bhinneka) budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan bangsa. Keragaman struktur budaya dalam masyarakat menjadikan multikulturalisme terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Multikulturalisme Isolasi

Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

2. Multikulturalisme Akomodatif

Masyarakat ini memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan/mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan.

3. Multikulturalisme Otonomi

Dalam model ini kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok dalam multikultural jenis ini adalah mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-

hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

4. Multikulturalisme Kritis/Interaktif

Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, akan tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif-perspektif berpikir ala mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas.

5. Multikulturalisme Kosmopolitan

Kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, yaitu tiap individu bebas dengan kehidupan-kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (Watson,1998).

Kelima jenis multikulturalisme di atas menunjukkan masing-masing kekhasannya. Pondasi multikulturalisme yang dibangun oleh masyarakat Pulau Kangayan merujuk pada salah satu konsep multikulturalisme yakni multikulturalisme akomodatif. Peran Suku Madura sebagai suku dominan di Pulau Kangayan tidak bertindak otonomi melainkan bertindak akomodatif guna memberikan ruang dan peran suku-suku minoritas (Bugis, Bajo, Makassar, Jawa, Etnis Cina dan Arab) untuk tetap berkembang dan bahkan dikarenakan perubahan sosial saat ini menjadi asimilasi kebudayaan tetapi tidak menentang kultur dominan Suku Madura.

Sepanjang sejarah bukan tidak mungkin, pada suatu ketika perubahan bahkan percampuran konsep multikulturalisme akan terjadi pada saat Masyarakat Pulau Kangayan menentukan keputusan berubah dengan acuan perubahan sosial yang besar dari luar. Kondisi tersebut tidak dapat dipastikan kapan, seperti apa prosesnya dan apa berakibat baik atau buruknya. Semua hanya dibisa dipastikan apabila Model Kampung Multikultural di Pulau Kangayan telah dipetakan secara menyeluruh dan dilakukan kajian etnografis secara mendalam selama beberapa waktu. Tulisan ini merupakan kajian awal dan dilakukan dengan pra-riset untuk memulai rencana penulisan disertasi doktoral penulis dengan rencana kajian tentang Dinamika Kampung Multikultural Masyarakat Pulau Kangayan Madura. Dari hasil tulisan awal ini diharapkan ada masukan dan kritik guna mendukung langkah penulisan disertasi lebih lanjut.

CONCLUSION

Kampung Multikultural di Pulau Kangayan tetap berpegang teguh dengan tradisi warisan leluhur telah membuatnya memiliki beberapa keunikan, baik dalam upacara bersih desa, pola pemertahanan larung laut, dan kehidupan lokal. Meski demikian suku dominant di Pulau Kangayan yakni Suku Madura telah menerapkan konsep multikulturalisme akomodatif yakni dengan memahami, menghargai, menilai atas budaya seseorang, menghormati keingintahuan tentang budaya suku/etnis lain, serta berupaya mencoba melihat kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggota masyarakat. Hal tersebut tercermin dari asimilasi budaya setelah terjadi perubahan sosial dengan gaya hidup bermigrasi ke negara lain maka yang disepakati adalah mengemas ke kegiatan larung laut secara bersama dan menyediakan ruang sosialisasi melalui berbagai kegiatan dalam keagamaan Islam.

REFERENCE

- Ahimsa-Putra, H.S. 2002. *Meninjau Kembali Universalitas Nilai-Nilai Dunia*. www.fisip.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2002/68/09tinjnk68.pdf diakses pada Kamis, 8 April 2010.
- Achwam, Rochman. 2001. *Permasalahan Integrasi dan Disintegrasi Bangsa: Penggunaan Simbol-simbol Budaya*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Jakarta.
- Aly, A. 2005. *Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik*. UMS Press. Surakarta.
- Azra, A. 2004. *Demokrasi Multikultural*. Tripustaka. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. 2008. *Kabupaten Sumenep Dalam Angka*. BPS Sumenep. Sumenep.
- Budiman, H. 2005. *Hak Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas. Hak Minoritas (Dilema Multikulturalisme di Indonesia)*. The Interseksi Foundation. Jakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Djojoprajitno, S. 2005. *Kangean : Dari Zaman Wilwatikta Sampai Republik Indonesia (1350 -1950)*. KNM (Kangean Nyiur Melambai). Pamekasan Madura.
- Geertz, C. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hefner, R.W. 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius. Yogyakarta.

- Koentjaraningrat dkk. 1993. *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Seri Etnografi Indonesia No. 4 Bekerjasama Departemen Sosial dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial dengan PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Trunojoyo. 2009. *Potensi Madura Daratan dan Kepulauan*. Laporan Penelitian Bekerjasama dengan Balitbang Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- May,L., Collins-Chobanian, S., Wang, K. (Ed). 2001. *Etika Terapan I. Sebuah Pendekatan Multikultural*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- May,L., Collins-Chobanian, S., Wang, K. (Ed). 2001. *Etika Terapan II. Sebuah Pendekatan Multikultural*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Muqtafa, M. K. 2000. *Paradigma Multikultural*. www.gusdur.net/indonesia/detail.asp di akses 21 Okt.2005.
- Nasikun. 2002. *Sistem Sosial Indonesia*. PT.Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Rahman, B. dan Yuswadi, H. 2004. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Kompyawisda Jatim dan LKPM – FISIP- Universitas Jember. Jember.
- Saifuddin, A.F. 2005. *Antropologi Kontemporer : Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Prenada Media. Jakarta.
- Satriyati, E., dkk. 2009 *Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan Pertambangan Berbasis Kebutuhan Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura*. Laporan Hibah Stranas-DP2M DIKTI. Tidak diterbitkan. LPPM Universitas Trunojoyo. Bangkalan.
- Sedyawati, E. Ed. 2001. *Permasalahan Integrasi dan Disintegrasi Bangsa: Penggunaan Simbol-simbol Budaya*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar Sosiologi*, Gramedia. Jakarta.
- Suparlan, P., 2002. *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 6. Jakarta.
- _____. 2002. *Konflik Antar-Sukubangsa dan Upaya Mengatasinya*. Temu Tokoh : "Dengan Keberagaman Etnis Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Menuju Integrasi Bangsa". Badan Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya - Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) Pontianak. Singkawang, 12-14 Juni 2002.
- Spradley, J.P.1997. *Metode Etnografi*. PT. Tiara Wacana.Yogyakarta.
- Suryadinata, L, dkk. 2003. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo. Jakarta.

Watson, C.W. 1998. Multiculturalisme. www.free-ejournal.com diakses pada Minggu, 22 Agustus 2010 pukul 08.33 WIB.